



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**DINAS KESEHATAN**

Jalan Jend. Sudirman No.1 Kota Payakumbuh Telepon 0752-92418, Faks 0752-92172  
e-mail: dinaskesehatankablimapuluhkota@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

**NOMOR:440/ 52 /DISKES.1/2022**

**TENTANG  
PENUNJUKAN PERSONIL PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PUSKESMAS  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022, perlu disusun struktur pelaksana program, kegiatan dan sub kegiatan;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengandung pengadaan barang/jasa pada UPTD Puskesmas, diperlukan organisasi pengadaan barang/jasa;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf h Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Pengadaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan personil pejabat pengadaan barang dan jasa pada unit pelaksana teknis dinas (UPTD) Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 dengan suatu Keputusan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemeritahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang ~~Pengadaan~~ Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor G3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016, Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 74 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 74);

15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 92);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menunjuk personil pejabat pengadaan barang dan jasa pada unit pelaksana teknis dinas (UPTD) Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini
- KEDUA** : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai Tugas Pokok dan Kewenangan sebagai berikut:
1. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
  2. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  3. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
  4. melaksanakan **E-purchasing** yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KELIMA** : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEENAM** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2022.

Ditetapkan di : Payakumbuh  
Pada tanggal : 24 Januari 2022

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
Selaku Pengguna Anggaran

**dr.H.ADEL NOFIARMAN**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196509141998031002

**Tembusan:** disampaikan kepada Yth;

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Inspektur Kab. Lima Puluh Kota di Srilamak
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip -----

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN**

NOMOR : 440/ 52 /Diskes.1/2022

TANGGAL : 24 JANUARI 2022

TENTANG: PENUNJUKAN PERSONIL PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN

NO	PEJABAT PENGADAAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN					UPTD	
1	2	3					4	
<b>A</b> Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya dengan metode pemilihan Pengadaan Langsung (PL) dan E-Purchasing yang tidak menggunakan bentuk kontrak berupa Surat Perjanjian Kerja (SPK)								
1	Nama : Amelia Kartika Sari. AMK NIP : 198905192011012001	1	02	01			Puskesmas Tanjung Pati	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
		1	02	01	2.1			Peningkatan Pelayanan BLUD
		1	02	01	2.1	01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Tanjung Pati)
		1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
2	Nama : Rahmawati. A.Md.KG NIP : 197508102006042004	1	02	01			Puskesmas Taram	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
		1	02	01	2.1			Peningkatan Pelayanan BLUD
		1	02	01	2.1	01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Taram)
		1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
3	Nama : Zulfaroza, SH NIP : 197509292014082001	1	02	01			Puskesmas Suliki	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
		1	02	01	2.1			Peningkatan Pelayanan BLUD
		1	02	01	2.1	01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Suliki)
		1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
3	Nama : Zulfaroza, SH NIP : 197509292014082001	1	02	02	2.02		Puskesmas Baruh Gunuang	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
		1	02	02	2.02	33		Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Baruh Gunuang)
		1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		1	02	01	2.1			Peningkatan Pelayanan BLUD
3	Nama : Zulfaroza, SH NIP : 197509292014082001	1	02	01	2.1	01	Puskesmas Banja Loweh	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Banja Loweh)						
		1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		1	02	02	2.02	33		Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Banja Loweh)

NO	PEJABAT PENGADAAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN					UPTD		
1	2	3					4		
4	Nama : Dina Lucia V, S.ST NIP : 197711202005012007	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Situjuh	
					2.1				Peningkatan Pelayanan BLUD
		1	02	01	2.1	01			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Situjuh)
		1	02	02					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
					2.02				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		1	02	02	2.02	33			Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Situjuh)
5	Nama : Rika Fitri Yeni NIP : 198212092006042005	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Rimbo Data	
					2.1				Peningkatan Pelayanan BLUD
		1	02	01	2.1	01			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Rimbo Data)
		1	02	02					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
					2.02				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		1	02	02	2.02	33			Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Rimbo Data)
5	Nama : Rika Fitri Yeni NIP : 198212092006042005	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Pangkalan	
					2.1				Peningkatan Pelayanan BLUD
		1	02	01	2.1	01			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Pangkalan)
		1	02	02					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
					2.02				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		1	02	02	2.02	33			Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Pangkalan)
5	Nama : Rika Fitri Yeni NIP : 198212092006042005	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Gunung Malintang	
					2.1				Peningkatan Pelayanan BLUD
		1	02	01	2.1	01			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Gunung Malintang)
		1	02	02					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
					2.02				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		1	02	02	2.02	33			Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Gunung Malintang)
6	Nama : Nuur Latifah Rizal.S.ST NIP : 198704062009012001	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Mungo	
					2.1				Peningkatan Pelayanan BLUD
		1	02	01	2.1	01			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Mungo)
		1	02	02					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
					2.02				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	02	02	2.02	33		Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Mungo)			

NO	PEJABAT PENGADAAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN					UPTD
1	2	3					4
7	Nama : Mira Novita,S.Kep NIP : 198011262005012012	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Piladang
1	02	01	2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Padang Kandis		
1	02	01	2.1	01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Piladang)			
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	02	2.02	33 Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Piladang)			
8	Nama : Eggi Marta. AMG NIP : 198703152010012007	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Halaban
1	02	01	2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Pakan Rabaa		
1	02	01	2.1	01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Halaban)			
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	02	2.02	33 Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Halaban)			
9	Nama : Eria Erwin, S.Si, Apt NIP : 197107072002121005	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Muaro Paiti
1	02	01	2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Sialang		
1	02	01	2.1	01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Muaro Paiti)			
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	02	2.02	33 Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Muaro Paiti)			
		1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Sialang
1	02	01	2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Sialang		
1	02	01	2.1	01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Sialang)			
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	02	2.02	33 Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Sialang)			

NO	PEJABAT PENGADAAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN					UPTD	
1	2	3					4	
10	Nama : Mela Sari Nelsa, SKM NIP : 198601112010012009	1	02	01			Puskesmas Koto Baru Simalanggang	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
		1	02	01	2.1			Peningkatan Pelayanan BLUD
		1	02	01	2.1	01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Koto Baru SMLG)
		1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Koto Baru SMLG)	
11	Nama : Khuriatul Desra NIP : 198211052010012014	1	02	01			Puskesmas Dandung-dandung	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
		1	02	01	2.1			Peningkatan Pelayanan BLUD
		1	02	01	2.1	01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Dandung- dangung)
		1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Dandung- dangung)	
12	Nama : Laila Musniati NIP : 197408282006042011	1	02	01			Puskesmas Mungka	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
		1	02	01	2.1			Peningkatan Pelayanan BLUD
		1	02	01	2.1	01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Mungka)
		1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Mungka)	
13	Nama : Siska Haryanti.AMKG NIP : 198304062009012004	1	02	01			Puskesmas Koto Tinggi	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
		1	02	01	2.1			Peningkatan Pelayanan BLUD
		1	02	01	2.1	01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Koto Tinggi)
		1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Koto Tinggi)	
14	Nama : Ns. Kristina Yuherni. NIP : 19830815 200901 2 003	1	02	01			Puskesmas Maek	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
		1	02	01	2.1			Peningkatan Pelayanan BLUD
		1	02	01	2.1	01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Maek)
		1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas	

NO	PEJABAT PENGADAAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	UPTD
1	2	3	4
B	Pejabat Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan metode pemilihan Pengadaan Langsung		Nilai paket ≤ Rp. 200
1	Nama : SYUKRI BADRI, S.Sos NIP/ Gol : 19830910 200901 1 004/ III.d		
C	Pejabat Pengadaan Pekerjaan Jasa konsultan Perencanaan Konstruksi dengan metode pemilihan Pengadaan Langsung		Nilai paket ≤ Rp. 100 Juta
1	Nama : HENDRA PERMANA, S.Sos NIP/ Gol : 19701012 200701 1 005/ III.c		
D	Pejabat Pengadaan Pekerjaan Jasa konsultan Pengawasan Konstruksi dengan metode pemilihan Pengadaan Langsung		Nilai paket ≤ Rp. 100 Juta
1	Nama : BONI PUTRA, S.Sos, MM NIP/ Gol : 19820123 200501 1 001/ III.c		

Ditetapkan di Payakumbuh,  
pada tanggal : Januari 2022

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Selaku Pengguna Anggaran

dr. H. ADEL NOFIARMAN  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19650914 199803 1 002